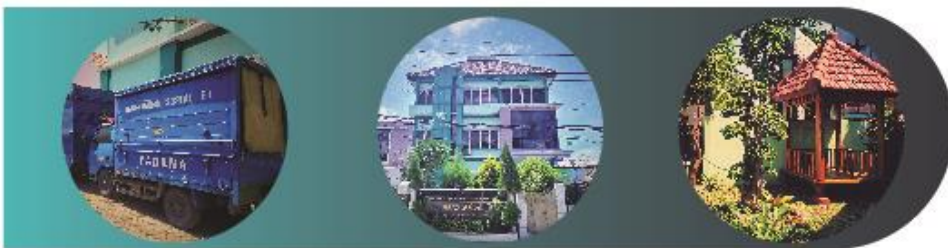





2022


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS SOSIAL

 Jl. Pahlawan No. 45, Sidoarjo

 [dinsos.sidoarjo](https://www.instagram.com/dinsos.sidoarjo)

 dinsos.sidoarjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good and Clean Government.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO**



Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196804111989081001

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GRAFIK | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kedudukan | 1 |
| 1.2 Aspek Strategis Organisasi | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 5 |
| 2.1 Visi dan Misi | 5 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran | 5 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 6 |
| 2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022 | 9 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 10 |
| 3.1 Pengukuran Kinerja | 10 |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja | 14 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 25 |
| 3.4 Efisiensi Tahun 2022 | 29 |
| BAB IV PENUTUP | 31 |
| 4.1 Kesimpulan | 31 |
| 4.2 Rencana Tindaklanjut | 32 |
| BERITA ACARA REVIU LKJIP Tahun 2022 | 33 |
| LAMPIRAN | 36 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Data ASN Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo | 2 |
| Tabel 1.2 | Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah | 3 |
| Tabel 2.1 | Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Sosial | 5 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 6 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Tambahan | 7 |
| Tabel 2.4 | Rincian Anggaran Pada Tahun 2022 | 9 |
| Tabel 3.1 | Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja | 11 |
| Tabel 3.2 | Hasil Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja | 11 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Indikator Tujuan | 14 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | 15 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Nasional | 18 |
| Tabel 3.6 | Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022 | 19 |
| Tabel 3.7 | Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Terhadap Target Akhir Renstra ... | 20 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan | 21 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Kinerja Dan Keuangan | 26 |
| Tabel 3.10 | Tingkat Efisiensi Anggaran | 29 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 3.1 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan..... | 15 |
| Grafik 3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022 | 17 |
| Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya PPKS yang Terlayani Tahun 2021-2022 | 19 |
| Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama | 20 |
| Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra | 20 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo | 2 |
|--|---|

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKJIP tahun 2022 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja tahun 2022 yang menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 adalah Sasaran Strategis yaitu a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan b. Meningkatnya kualitas pelayanan PPKS, dengan Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (tercapai 100,68%) dan Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan (tercapai 102,26%) dengan kategori Sangat Baik, yang menandakan bahwa kinerja tercapai.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial mengampu 2 Program Prioritas Bupati Terpilih yaitu Makan Gratis Warga Miskin dan Beasiswa untuk warga miskin. Untuk Program Makan Gratis Warga Miskin telah dilaksanakan mulai 1 September 2022 dengan sasarannya adalah Lansia yang ber KTP di Sidoarjo dimana ada 730 penerima diberikan makanan sehari 2 kali senilai Rp. 15.000,- Untuk Beasiswa warga miskin Dinas Sosial mendapatkan kuota sebanyak 500 penerima dengan nilai masing-masing penerima Rp. 2.500.000,-

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS tercapai sebesar 102,97% dengan kategori sangat baik dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,34%. Secara umum Dinas Sosial telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Dari segi anggaran terdapat efisiensi sebesar 8,66% atau Rp 3.006.588.270,- Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari aktivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan ketercapaian ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik diinternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder/mitra

sosial yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Kolaborasi penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan program prioritas Bupati yaitu makanan gratis warga miskin dan beasiswa untuk mendukung ketercapaian kinerja Dinas Sosial.

Kemampuan SDM yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung keberhasilan baik petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, mitra sosial ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan tersebut. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kedudukan

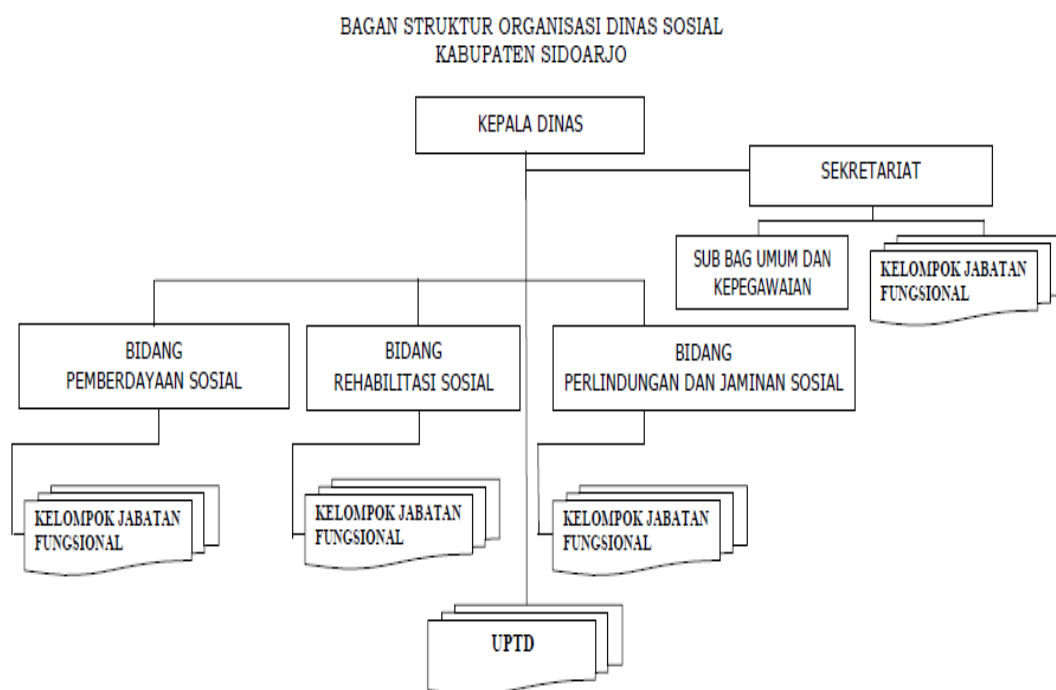
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang sosial.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 28 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo

| No | Jenis Jabatan | Jumlah |
|----|------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Administrator | 3 |
| 3 | Pengawas | 1 |
| 4 | Pelaksana | 14 |
| 5 | Jabatan Fungsional Ahli Muda | 7 |
| 6 | Jabatan Fungsional Mahir | 1 |
| | Total | 27 |

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Umum

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|--|
| 1 | Jumlah PPKS yang terus mengalami peningkatan | Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS | Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS |
| | | Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS | Belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS. |
| 2 | Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan program perlindungan dan jaminan social | Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan | Tata kelola program perlindungan dan jaminan social masih lemah |
| 3 | Masih terdapat kesalahan data pada DTKS Kabupaten Sidoarjo | lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by</i> | Komunikasi dan koordinasi lintas sector (PD) yang belum berjalan lancar dan massif. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <i>address</i> lintas Perangkat Daerah (PD). | |
| 4 | Program penanganan kemiskinan (PPKS) masih berjalan parsial | Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain | Sinergi antar perangkat daerah dalam hal penanganan kemiskinan (PPKS) masih lemah |
| 5 | Belum optimalnya penanganan dampak sosial bencana | Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah | Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih terbatas. |

Sumber data : Renstra 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan;
- b. Lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis *by name by address* lintas Perangkat Daerah (PD);
- c. Kurang optimalnya pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS;
- d. Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS;
- e. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
- f. Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih perlu ditingkatkan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 2 yaitu **“Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan”**.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan 2 yang akan kami dukung adalah Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran 4 yaitu menurunnya penduduk miskin yang dituju. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan yaitu Peningkatan Kesejahteraan sosial dan sasarannya yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS. Perencanaan strategis Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Sosial

| Misi RPJMD Kab. Sidoarjo | Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo | Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo | Tujuan Renstra OPD | Sasaran Renstra OPD |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| M.2 Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada | T.2 Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada | S.4 Menurunnya Penduduk Miskin | Peningkatan Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|
| Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|

Sumber data : Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|--------------------------------------|--|--------|
| 1 | Peningkatan Kesejahteraan Sosial | Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan | 94% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan | 80% |

Sumber data : PK Perubahan Kepala Dinas Sosial tahun 2022

Pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra, indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan, dengan target 94% dengan pertimbangan capaian tahun lalu 94,07% dan target di Renstra tahun 2022 94%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 94%.

Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang

mendapatkan pelayanan di tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 menjadi kondisi awal target di Renstra tahun 2022 untuk indikator Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 80%.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tambahan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN | TARGET |
|-----------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Tersalurnya Beasiswa Untuk Mahasiswa dari Keluarga Miskin | Jumlah Mahasiswa Keluarga Miskin yang Mendapatkan Beasiswa | 500 Orang |
| 2 | Tersalurkannya Bantuan Program Gratis Makanan Setiap Hari Bagi Warga Miskin | Jumlah orang penerima bantuan program gratis makanan setiap hari warga miskin | 730 Orang/kali @ 2 kali |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP Nilai RB Nilai IPP Nilai SKM Persentase Penyerapan Anggaran | BB 27% A Sangat Baik 85% |

Sumber data : PK Perubahan Kepala Dinas Sosial tahun 2022

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Kepala Dinas Sosial untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikordinasikan oleh Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 38.010.865.096,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 34.510.768.477,- dengan rincian sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Pada Tahun 2022

| No | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN | ANGGARAN PERUBAHAN |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------|
| 1 | Peningkatan Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23,460,000.00 | 11,460,000.00 |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,567,097,417.00 | 5,120,744,077.00 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 650,213,487.00 | 602,692,268.00 |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40,689,235.00 | 68,583,575.00 |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,128,840,800.00 | 1,199,770,800.00 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 684,059,985.00 | 639,159,985.00 |
| | | | | | | |
| 2 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 2,863,359,695.00 | 2,534,086,740.00 |
| 3 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 8,168,577,923.00 | 7,473,289,362.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | 141,225,000.00 | 141,225,000.00 |
| 4 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 17,988,026,514.00 | 15,946,621,514.00 |
| 5 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| | | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 352,475,590.00 | 350,475,590.00 |
| 6 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 202,839,450.00 | 222,659,566.00 |
| Total Anggaran | | | | | 38,010,865,096.00 | 34,710,768,477.00 |

Sumber data : DPPA Dinas Sosial 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

| No. | Nilai | Predikat Kinerja |
|-----|-----------------|------------------|
| 1 | $> 90,01$ | Sangat Baik |
| 2 | $80,01 \leq 90$ | Baik |
| 3 | $70,01 \leq 80$ | Cukup |
| 4 | $0 \leq 70,01$ | Kurang |

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | % Capaian | Kategori |
|----|---|--|----------------|--------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | 100% | Sangat Baik |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan | 100% | Sangat Baik |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu | 100% | Sangat Baik |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | 100% | Sangat Baik |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | 100% | Sangat Baik |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen monev PD yang tersusun | 100% | Sangat Baik |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 101.49% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | Sangat Baik |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun | 100% | Sangat Baik |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 108.18% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 98.21% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah BBM yang disediakan | 83.25% | Baik |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia | 99.11% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia | 100% | Sangat Baik |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan | 49.93% | Kurang |
| | | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 49.93% | Kurang |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti | 100% | Sangat Baik |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan | 100% | Sangat Baik |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola | 98.27% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah tenaga non ASN yang terbayar | 100% | Sangat Baik |

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|--------------------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan | 129.47% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 85.00% | Baik |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya | 94.44% | Sangat Baik |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi | 100% | Sangat Baik |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 168% | Sangat Baik |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 100% | Sangat Baik |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 100% | Sangat Baik |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang Dibina | 100% | Sangat Baik |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM yang dibina | 100% | Sangat Baik |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK yang dibina | 100% | Sangat Baik |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina | 100% | Sangat Baik |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah LK3 yang dibina | 100% | Sangat Baik |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS prioritas yang terlayani | 100% | Sangat Baik |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Sandang | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu | 100% | Sangat Baik |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--------------------|
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | 100% | Sangat Baik |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial | 100% | Sangat Baik |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS | 100% | Sangat Baik |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis | 100% | Sangat Baik |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan | 100% | Sangat Baik |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan | 100% | Sangat Baik |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | 100.43% | Sangat Baik |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 97.42% | Sangat Baik |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi | 99.15% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan | 100% | Sangat Baik |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan | 100% | Sangat Baik |
| | | Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT | 100% | Sangat Baik |
| | | Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH | 100% | Sangat Baik |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin | 100% | Sangat Baik |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah KUBE yang Dimonev | 0.00% | Kurang |
| | | Jumlah KUBE yang Memperoleh Akses Permodalan | 83% | Baik |
| | | Jumlah KUBE yang Terbentuk | 100% | Sangat Baik |
| | | Jumlah Warga Miskin yang Dilatih | | |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | 100% | Sangat Baik |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani | 100% | Sangat Baik |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan | 92.80% | Sangat Baik |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah TAGANA yang Dibina | 100% | Sangat Baik |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang menerima penguatan SDM | 100% | Sangat Baik |

| | | | | |
|---|--|---|------|-------------|
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase sarpras dalam kondisi yang baik | 100% | Sangat Baik |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik | 100% | Sangat Baik |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 100% | Sangat Baik |
| | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar | 100% | Sangat Baik |

Sumber data : Laporan Monev Tribulan IV tahun 2022

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial_Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 :

1. Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2022 telah tercapai kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Tujuan

| No. | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2022 | | |
|-----|---|------------|---------------|--------|
| | | TARGET (%) | REALISASI (%) | % |
| 1 | Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | 94,00 | 94,64 | 100,68 |

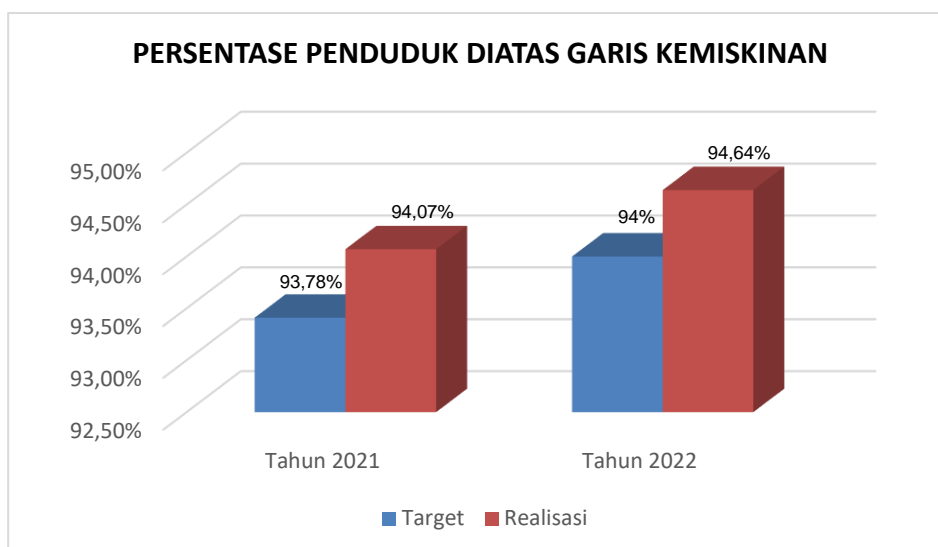
Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Yang dimaksud dengan "Kemiskinan" adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin berdasarkan releas BPS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 5,71% dan tahun 2022 sebesar 6%, dengan demikian dapat disimpulkan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 sebanyak 1.989.167 jiwa atau sekitar 94,64% dari

jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021: 93,78% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan tercapai 94,64%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 94,07% maka terdapat peningkatan angka 11.980 jiwa atau sekitar 0,57%. Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.1 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan



Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya yang dilaksanakan sesuai sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS, dimana dengan pelayanan yang meningkat maka kemiskinan akan turun yang berdampak pada penduduk diatas garis kemiskinan naik.

2. Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 102,97%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS

Tabel 3.4
Realisasi kinerja sasaran pertama
meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|--------------------------------------|--|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan | 80% | 82.38% | 102.97% |

Grafik 3.2
Realisasi Kinerja Sasaran Pertama
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022



Dalam pencapaian sasaran diukur tingkat keberhasilannya dengan 1 (satu) indikator. Indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan adalah jumlah PPKS (DTKS dan Non DTKS) yang menerima layanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dapat direalisasi sebesar 82,38% dari target tahun ini ditetapkan sebesar 80%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. *Launching* program Beasiswa untuk warga miskin serta makan gratis untuk lanjut usia;
2. Pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas berat, permakanan anak panti asuhan;
3. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBN/APBD, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Minyak Goreng, BLT BBM
4. Bantuan sembako bagi warga miskin gan pengemudi bentor sebagai dampak inflasi BBM

5. Bantuan sosial lanjut usia komprehensif berupa sembako, alat bantu (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar), Kasur, bantal dan guling serta alat tensimeter dan glukotest;
6. Pemberian alat bantu kursi roda, kruk, motor roda 3, tongkat adaptif dan alat bantu lainnya untuk disabilitas dan lanjut usia;
7. Pemberian bantuan berupa barang kepada KUBE;
8. Mengeluarkan rekomendasi/surat keterangan jaminan Kesehatan masyarakat miskin (PBI/JKMM);
9. Mengeluarkan Surat keterangan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk layanan akses pendidikan;
10. Melakukan pembinaan kepada penghuni UPT PP Rehsos dan ODHA;
11. Memfasilitasi orang kehabisan bekal;
12. Memberikan pelatihan dasar bagi PPKS;
13. Pengiriman pelatihan dan rehabilitasi bagi PPKS ke UPT milik provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPKS. Seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) maka akan dirujuk ke RSJ Menur sebagai pusat rehabilitasi. Untuk penyandang disabilitas akan dikirim ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Fisik (BBRSBDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta , UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa dan Rungu Wicara di Pasuruan, UPT Balai Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang
14. Pendataan PPKS dan data kemiskinan secara berkala;
15. Pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, PSM, LKS, LK3 Tagana, SLRT dan karang taruna karena mitra kerja ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan serta pengentasan kemiskinan.
16. Penggunaan aplikasi sipraja dan si Whapik untuk pengajuan JKMM.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruhnya warga masyarakat miskin dan PPKS lainnya tercover dalam program perlindungan jaminan sosial khususnya program jaminan Kesehatan nasional (JKN);
2. Updating Data PPKS dan data kemiskinan yang kurang maksimal;
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang belum optimal;
4. Pemberdayaan fakir miskin dan PPKS lainnya yang belum optimal;
5. Kondisi sarana dan prasarana serta Gedung UPT PP Rehsos yang belum sesuai standar;
6. Kapasitas SDM bidang sosial yang belum optimal;
7. Pada tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga berdampak terhadap perekonomian, dan banyak pekerja yang di PHK oleh perusahaan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang kurang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Nasional

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2022 | Kinerja Provinsi/ Nasional |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan | 82,38% | 100% (Sandart Pelayanan Minimal) |

Sumber : olah data

Indikator Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dengan target 80% dari jumlah PPKS pada tahun 2022 sebanyak 472.340 jiwa. Realisasi PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2022 sebanyak 486.406 jiwa (82,38%). Dari target 80% jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan tercapai 82,38%. Dengan demikian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2022 tercapai 102,97%.

Indikator Dinas Sosial 2021 adalah persentase jumlah PMKS yang terlayani. Target PMKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2021 sebanyak 48.718

dan realisasi PPKS sebanyak 48.718. dengan demikian pada tahun 2021 kinerja Dinas Sosial tercapai 100%.

Adanya perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2022 menjadikan tidak dapat diperbandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi konsep PMKS/PPKS adalah keseluruhan PPKS yang terdata yaitu 48.718 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 definisi konsepnya PPKS adalah keseluruhan penduduk miskin yang tercatat dalam DTKS ditambah penduduk miskin yang belum terdaftar dalam DTKS sehingga terjadi pelonjakan data PPKS yang mendapatkan pelayanan di tahun 2022 sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut :

Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya PPKS yang Terlayani Tahun 2021-2022

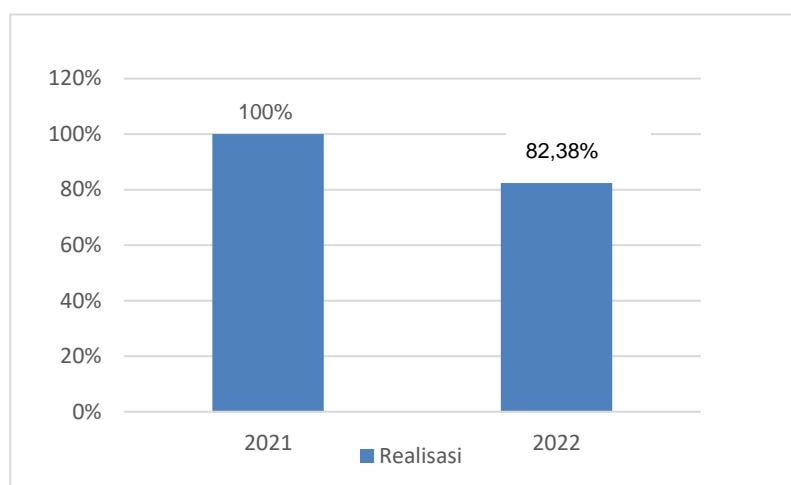


**Tabel 3.6
Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi | |
|-----|---|---|-----------|--------|
| | | | 2021 | 2022 |
| 1 | Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase Penurunan PMKS terhadap Penduduk | 100% | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan | | 82,38% |

Sumber : olah data

Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama



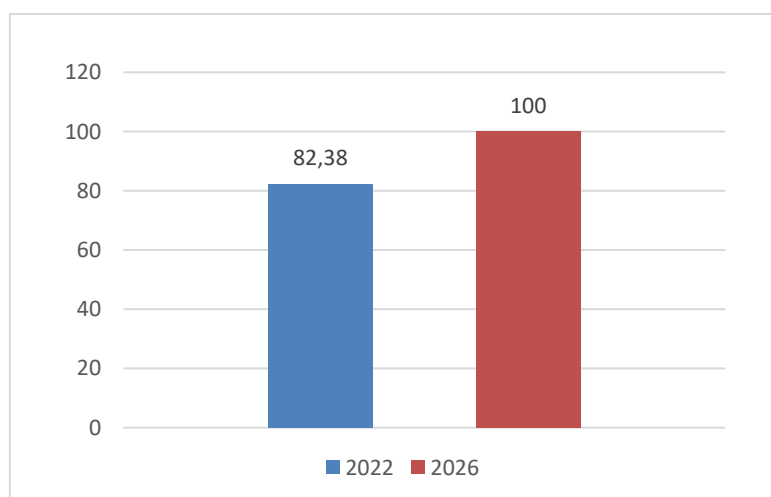
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026 yaitu 82,38% dari target akhir sebesar 100%. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

**Tabel 3.7
Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Terhadap
Target Akhir Renstra**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target akhir Renstra | Realisasi Tahun 2022 | Persentase Kemajuan |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS Yang mendapatkan Pelayanan | 100% | 82,38% | 82,38% |

Sumber : olah data

**Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra**



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS adalah sebesar Rp. 34.710.768.477,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.704.180.2017,-. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan PPKS.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | KINERJA | | ANGGARAN | |
|----|--|--|-------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | Target | Realisasi | TARGET | REALISASI |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | % | 90 | 90 | 7,642,410,705.00 | 6,979,940,339.00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti | Rekomendasi | 4 | 4 | 11,460,000.00 | 5,840,100.00 |
| | | Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan | Tahap | 2 | 2 | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 4 | 4 | 2,000,000.00 | 1,219,900.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 3,210,000.00 | 747,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 3 | 3 | 3,400,000.00 | 2,801,200.00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen monev PD yang tersusun | Dokumen | 4 | 4 | 2,850,000.00 | 1,072,000.00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | % | 90 | 91.34 | 5,120,744,077.00 | 4,712,713,428.00 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | 12 | 5,118,394,077.00 | 4,712,008,228.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun | Laporan | 1 | 1 | 2,350,000.00 | 705,200.00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | % | 90 | 97.36 | 602,692,268.00 | 521,929,451.00 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | Buah | 119 | 119 | 6,750,596.00 | 6,725,950.00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Buah | 894 | 878 | 46,650,057.00 | 45,030,150.00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah BBM yang disediakan | Liter | 21300 | 17732 | 213,000,000.00 | 177,344,819.00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia | Lembar | 3380 | 3350 | 4,399,250.00 | 4,365,500.00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia | Jenis | 3 | 3 | 5,961,600.00 | 4,915,000.00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan | Kotak | 685 | 342 | 14,862,500.00 | 6,823,100.00 |
| | | Jumlah kunjungan tamu yang diasilitasi | Orang | 685 | 342 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 311,068,265.00 | 276,724,932.00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan | Unit | 13 | 13 | 68,583,575.00 | 65,768,800.00 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan | Unit | 13 | 13 | 68,583,575.00 | 65,768,800.00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran | % | 100 | 100 | 1,199,770,800.00 | 1,089,998,853.00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola | Surat | 13000 | 12775 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar | Bulan | 12 | 12 | 302,000,000.00 | 254,316,505.00 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar | Orang | 228 | 228 | 897,270,800.00 | 835,182,348.00 |
| | | Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar | Orang | 48 | 48 | | |
| | | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar | Orang | 48 | 48 | | |
| | | Jumlah tenaga non ASN yang terbayar | Orang | 336 | 336 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan | Unit | 95 | 123 | 639,159,985.00 | 583,689,707.00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Unit | 40 | 34 | 132,500,000.00 | 131,824,900.00 |
| | | Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya | STNK | 18 | 17 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 2 | 2 | 230,000,000.00 | 226,142,717.00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 50 | 84 | 196,029,985.00 | 166,618,750.00 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 3 | 3 | 80,630,000.00 | 59,103,340.00 |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 60 | 60 | 2,534,086,740.00 | 2,496,348,625.00 |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang Dibina | PSKS | 6 | 6 | 2,534,086,740.00 | 2,496,348,625.00 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM yang dibina | PSM | 100 | 100 | 72,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK yang dibina | TKSK | 18 | 18 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina | PSKS Kelembagaan | 5 | 5 | 2,022,786,050.00 | 1,991,048,925.00 |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah LK3 yang dibina | LK3 | 1 | 1 | 7,300,690.00 | 7,299,700.00 |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS prioritas yang terlayani | % | 59.51 | 59.51 | 7,614,514,362.00 | 7,520,040,356.00 |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani | Orang | 1311 | 1311 | 7,473,289,362.00 | 7,379,051,356.00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani | Orang | 10 | 10 | | |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani | Orang | 120 | 120 | | |
| | | Jumlah PPKS Klien Liposos yang Terlayani | Orang | 900 | 900 | | |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan | Orang | 2311 | 2311 | 5,817,347,244.00 | 5,792,981,519.00 |
| | Penyediaan Sandang | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang | Orang | 900 | 900 | 45,101,800.00 | 34,308,000.00 |
| | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu | Orang | 30 | 30 | 144,650,000.00 | 133,526,800.00 |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | Orang | 920 | 920 | 386,650,000.00 | 382,332,600.00 |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial | Keluarga | 100 | 100 | 17,275,000.00 | 16,975,000.00 |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS | Bulan | 12 | 12 | 215,034,084.00 | 184,948,576.00 |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis | Bulan | 12 | 12 | 847,231,234.00 | 833,978,861.00 |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan | Orang | 220 | 220 | 141,225,000.00 | 140,989,000.00 |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan | Orang | 220 | 220 | 141,225,000.00 | 140,989,000.00 |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | % | 97 | 97.42 | 15,946,621,514.00 | 13,754,816,045.00 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jiwa | 659156 | 642153 | 15,946,621,514.00 | 13,754,816,045.00 |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi | Desa/Kel | 353 | 350 | 192,450,550.00 | 171,493,450.00 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan | Kali | 3 | 3 | | |
| | | Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan | % | 80 | 80 | 44,537,600.00 | 44,493,556.00 |
| | | Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT | % | 80 | 80 | | |
| | | Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH | % | 80 | 80 | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan | KPM | 2700 | 2700 | 15,291,332,494.00 | 13,217,755,314.00 |
| | | Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin | KPM | 730 | 730 | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah KUBE yang Dimonev | Kube | 18 | 0 | 418,300,870.00 | 321,073,725.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|-------|------|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | Jumlah KUBE yang Memperoleh Akses Permodalan | Kube | 18 | 15 | | |
| | | Jumlah KUBE yang Terbentuk | Orang | 180 | 180 | | |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Jumlah Warga Miskin yang Dilatih | | | | | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 750,475,590.00 | 731,966,750.00 |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani | % | 100 | 100 | 400,000,000.00 | 392,642,700.00 |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan | Orang | 1000 | 928 | 400,000,000.00 | 392,642,700.00 |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah TAGANA yang Dibina | Orang | 50 | 50 | 350,475,590.00 | 339,324,050.00 |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang menerima penguatan SDM | Orang | 50 | 50 | 350,475,590.00 | 339,324,050.00 |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase sarpras dalam kondisi yang baik | % | 100 | 100 | 222,659,566.00 | 221,068,092.00 |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik | % | 100 | 100 | 222,659,566.00 | 221,068,092.00 |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | TMP | 1 | 1 | 151,305,966.00 | 149,732,000.00 |
| | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar | Orang | 2 | 2 | 71,353,600.00 | 71,336,092.00 |
| Jumlah | | | | | | 34,710,768,477.00 | 31,704,180,207.00 |

Sumber data : LRA Dinas Sosial Tahun 2022

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan;
2. Meningkatkan Pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, PSM, LKS, LK3 Tagana, SLRT dan karang taruna secara berkala, karena mitra kerja ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan serta pengentasan kemiskinan
3. Melakukan pendataan PPKS dan data kemiskinan secara berkala;
4. Meningkatkan SDM mitra sosial agar optimalisasi pendataan DTKS dan PPKS secara terpadu;
5. Membentuk Puskesmas di setiap desa agar data selalu update;
6. Penggunaan aplikasi SIPEKA untuk meminimalisis kesalahan data;

7. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat;
8. Pembentukan KUBE baru untuk membantu perekonomian PPKS.

3.3 Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi kinerja dan keuangan

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|----|--|--|-------------|---------|-----------|--------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Target | Realisasi | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan | % | 90 | 90 | 100% | 7,642,410,705.00 | 6,979,940,339.00 | 91.33% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti | Rekomendasi | 4 | 4 | 100% | 11,460,000.00 | 5,840,100.00 | 50.96% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan | Tahap | 2 | 2 | 100% | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 4 | 4 | 100% | 2,000,000.00 | 1,219,900.00 | 61.00% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 100% | 3,210,000.00 | 747,000.00 | 23.27% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Dokumen | 3 | 3 | 100% | 3,400,000.00 | 2,801,200.00 | 82.39% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangak Daerah | Dokumen | 4 | 4 | 100% | 2,850,000.00 | 1,072,000.00 | 37.61% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | % | 90 | 91.34 | 101.49% | 5,120,744,077.00 | 4,712,713,428.00 | 92.03% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | 12 | 100% | 5,118,394,077.00 | 4,712,008,228.00 | 92.06% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun | Laporan | 1 | 1 | 100% | 2,350,000.00 | 705,200.00 | 30.01% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | % | 90 | 97.36 | 108.18% | 602,692,268.00 | 521,929,451.00 | 86.60% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia | Buah | 119 | 119 | 100% | 6,750,596.00 | 6,725,950.00 | 99.63% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Buah | 894 | 878 | 98.21% | 46,650,057.00 | 45,030,150.00 | 96.53% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah BBM yang disediakan | Liter | 21300 | 17732 | 83.25% | 213,000,000.00 | 177,344,819.00 | 83.26% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia | Lembar | 3380 | 3350 | 99.11% | 4,399,250.00 | 4,365,500.00 | 99.23% |
| | Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang- | Jenis | 3 | 3 | 100% | 5,961,600.00 | 4,915,000.00 | 82.44% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | undangan dan koran yang tersedia | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan | Kotak | 685 | 342 | 49.93% | 14,862,500.00 | 6,823,100.00 | 45.91% | |
| | | Jumlah kunjungan tamu yang diasilitasi | Orang | 685 | 342 | 49.93% | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100% | 311,068,265.00 | 276,724,932.00 | 88.96% | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan | Unit | 13 | 13 | 100% | 68,583,575.00 | 65,768,800.00 | 95.90% | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang diadakan | Unit | 13 | 13 | 100% | 68,583,575.00 | 65,768,800.00 | 95.90% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran | % | 100 | 100 | 100% | 1,199,770,800.00 | 1,089,998,853.00 | 90.85% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar masuk yang dikelola | Surat | 13000 | 12775 | 98.27% | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar | Bulan | 12 | 12 | 100% | 302,000,000.00 | 254,316,505.00 | 84.21% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar | Orang | 228 | 228 | 100% | 897,270,800.00 | 835,182,348.00 | 93.08% | |
| | | Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar | Orang | 48 | 48 | 100% | | | | |
| | | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar | Orang | 48 | 48 | 100% | | | | |
| | | Jumlah tenaga non ASN yang terbayar | Orang | 336 | 336 | 100% | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan | Unit | 95 | 123 | 129.47% | 639,159,985.00 | 583,689,707.00 | 91.32% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Unit | 40 | 34 | 85.00% | 132,500,000.00 | 131,824,900.00 | 99.49% | |
| | | Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya | STNK | 18 | 17 | 94.44% | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 2 | 2 | 100% | 230,000,000.00 | 226,142,717.00 | 98.32% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 50 | 84 | 168% | 196,029,985.00 | 166,618,750.00 | 85.00% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Unit | 3 | 3 | 100% | 80,630,000.00 | 59,103,340.00 | 73.30% | |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 60 | 60 | 100% | 2,534,086,740.00 | 2,496,348,625.00 | 98.51% | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang Dibina | PSKS | 6 | 12 | 200% | 2,534,086,740.00 | 2,496,348,625.00 | 98.51% |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM yang dibina | PSM | 100 | 100 | 100% | 72,000,000.00 | 66,000,000.00 | 91.67% |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK yang dibina | TKSK | 18 | 18 | 100% | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | 100% |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibina | PSKS Kelembagaan | 5 | 5 | 100% | 2,022,786,050.00 | 1,991,048,925.00 | 98.43% |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah LK3 yang dibina | LK3 | 1 | 1 | 100% | 7,300,690.00 | 7,299,700.00 | 99.99% |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS prioritas yang terlayani | % | 59.51 | 59.51 | 100% | 7,614,514,362.00 | 7,520,040,356.00 | 98.76% |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani | Orang | 1311 | 1311 | 100% | 7,473,289,362.00 | 7,379,051,356.00 | 98.74% |
| | | Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani | Orang | 10 | 10 | 100% | | | |
| | | Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani | Orang | 120 | 120 | 100% | | | |
| | | Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani | Orang | 900 | 900 | 100% | | | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan | Orang | 2311 | 2311 | 100% | 5,817,347,244.00 | 5,792,981,519.00 | 99.58% |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang | Orang | 900 | 900 | 100% | 45,101,800.00 | 34,308,000.00 | 76.07% |
| | Penyediaan Sandang | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu | Orang | 30 | 30 | 100% | 144,650,000.00 | 133,526,800.00 | 92.31% |
| | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | Orang | 920 | 920 | 100% | 386,650,000.00 | 382,332,600.00 | 98.88% |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial | Keluarga | 100 | 100 | 100% | 17,275,000.00 | 16,975,000.00 | 98.26% |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan PMKS | Bulan | 12 | 12 | 100% | 215,034,084.00 | 184,948,576.00 | 86.01% |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis | Bulan | 12 | 12 | 100% | 847,231,234.00 | 833,978,861.00 | 98.44% |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan | Orang | 220 | 220 | 100% | 141,225,000.00 | 140,989,000.00 | 99.83% |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan | Orang | 220 | 220 | 100.00% | 141,225,000.00 | 140,989,000.00 | 99.83% |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | % | 97 | 97.42 | 100.43% | 15,946,621,514.00 | 13,754,816,045.00 | 86.26% |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Jiwa | 659156 | 642153 | 97.42% | 15,946,621,514.00 | 13,754,816,045.00 | 86.26% |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa/Kelurahan yang Melakukan Verifikasi dan Validasi | Desa/Kel | 353 | 350 | 99.15% | 192,450,550.00 | 171,493,450.00 | 89.11% |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan | Kali | 3 | 3 | 100% | | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan | % | 80 | 80 | 100% | 44,537,600.00 | 44,493,556.00 | 99.90% |
| | | Persentase KPM BPNT yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM BPNT | % | 80 | 80 | 100% | | | |
| | | Persentase KPM PKH yang Memenuhi Persyaratan sebagai KPM PKH | % | 80 | 80 | 100% | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan | KPM | 2700 | 2700 | 100% | 15,291,332,494.00 | 13,217,755,314.00 | 86.44% |
| | | Jumlah Penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin | KPM | 730 | 730 | 100% | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah KUBE yang Dimonev | Kube | 18 | 0 | 0.00% | 418,300,870.00 | 321,073,725.00 | 76.76% |
| | | Jumlah KUBE yang Diperoleh | Kube | 18 | 15 | 83% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------|-----|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Akses Permodalan Jumlah KUBE yang Terbentuk | Orang | 180 | 180 | 100% | | | | |
| | | Jumlah Warga Miskin yang Dilatih | | | | | | | | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani | % | 100 | 100 | 100% | 750,475,590.00 | 731,966,750.00 | 97.53% | |
| | | Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani | % | 100 | 100 | 100% | 400,000,000.00 | 392,642,700.00 | 98.16% | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Makanan | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan | Orang | 1000 | 928 | 92.80% | 400,000,000.00 | 392,642,700.00 | 98.16% | |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah TAGANA yang Dibina | Orang | 50 | 50 | 100% | 350,475,590.00 | 339,324,050.00 | 96.82% | |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Orang | 50 | 50 | 100% | 350,475,590.00 | 339,324,050.00 | 96.82% | |
| | | Persentase sarpras dalam kondisi yang baik | % | 100 | 100 | 100% | 222,659,566.00 | 221,068,092.00 | 99.29% | |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi yang Baik | % | 100 | 100 | 100% | 222,659,566.00 | 221,068,092.00 | 99.29% | |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | TMP | 1 | 1 | 100% | 151,305,966.00 | 149,732,000.00 | 98.96% |
| | | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar | Orang | 2 | 2 | 100% | 71,353,600.00 | 71,336,092.00 | 99.98% |
| Jumlah | | | | | | | 34,710,768,477.00 | 31,704,180,207.00 | 91.34% | |

Sumber data : LRA Dinas Sosial 2022

3.4 Efisiensi Tahun 2022

Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Anggaran

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | % Tingkat Efisien |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Peningkatan Kesejahteraan Sosial | Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan | 100,68% | 91,34% | 9,34% |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan | 102,97% | 91,34% | 11,63% |

Sumber data : data diolah

Analisis efisiensi

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator diatas telah menunjukkan efisiensi. Pencapaian efisiensi anggaran sebesar 9,34% dan 11,63% pada tahun 2022 didukung oleh upaya :

1. Ketaatan dalam tatalaksana organisasi dan penatausahaan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Kolaborasi antara Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Inspektorat, BPKAD dan UKPBJ Kabupaten Sidoarjo, jika terdapat ketidak sesuaian (hal baru yang belum diatur) untuk mendapatkan solusi.
3. Pelayanan JKMM secara online dengan menggunakan aplikasi SIPRAJA dan Si Whapik memudahkan pemohon dalam kepengurusan tanpa harus datang ke Dinas Sosial dan dapat mencetak sendiri.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan indikator berupa Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan tercapai sebesar 100,68%.
2. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS tercapai sebesar 102,97% dengan kategori sangat baik dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,34%.
3. Secara umum Dinas Sosial telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Penerapan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.
5. Keberhasilan ketercapaian ini tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik diinternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sendiri, serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder/mitra sosial yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial.
6. Kolaborasi penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dan program prioritas Bupati yaitu makanan gratis warga miskin dan beasiswa untuk mendukung ketercapaian kinerja Dinas Sosial;
7. Kemampuan SDM yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung keberhasilan baik petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mitra sosial ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan tersebut. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan dan Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Dinas Sosial secara garis tidak ada kendala yang berarti.

Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal antara lain:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penduduk miskin melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pekerja sosial;
3. Koordinasi, harmonisasi, kolaborasi penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan berbagai pihak;
4. Memaksimalkan peran PSKS, SLRT dan pendamping sosial lainnya untuk membantu penanganan kesejahteraan sosial;
5. Implementasi hasil kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan;
6. Meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja dengan penguatan komitmen semua penanggung jawab penyelenggara kegiatan untuk lebih mengedepankan implementasi program/kegiatan yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan system penilaian kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 45 Sidoarjo

Telepon. 031-8921483

Email: dinsos.sidoarjo@gmail.com Website: www.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196804111989081001

FORMULIR CHECK LIST REVIEW

| NO. | | PERNYATAAN | CHECK LIST | | DATA PENDUKUNG |
|-----|----------------------|---|------------|-------|----------------|
| | | | YA | TIDAK | |
| I | Format | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP | v | | |
| | | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja | v | | |
| | | 3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai | v | | |
| | | 4. Lkj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | v | | |
| | | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M) | v | | |
| | | 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan | v | | |
| II | Mekanisme penyusunan | 1. Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | v | | |
| | | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang yang memadai | v | | |
| | | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj | v | | |
| | | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja | v | | |
| | | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya (M) | v | | |
| | | 6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait | v | | |
| | | 7. LKj IP <u>bulanan</u> merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M) | | | |
| III | Substansi | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | v | | |
| | | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis | v | | |
| | | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | v | | |
| | | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja | v | | |
| | | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja Utama | v | | |
| | | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | v | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | v | | |
| | | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran | | | |
| | | 9. Jika “tidak” telah mendapat penjelasan yang memadai | | | |
| | | 10. IKU dan IK telah SMART | | | |

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1w7WPG-x5_sgCNlq-xK_z5EiCLEm15vAK?usp=sharing

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/14ghKRFbNc4pVo9-RbXsyJjqQcEofi2d?usp=sharing>

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1F8NhGywFbAYpKw10UFuikqkJaulo1u6?usp=sharing>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1Pjrg1fkY3W2FgRJ1DmWC2CyfNlfbuiFZ?usp=sharing>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1wvbSKoQ94AC9cU8EKNX7US-wVnKoZzvR?usp=sharing>

